

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nilai wajar merupakan salah satu isu yang banyak dibahas dalam implementasi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) di seluruh dunia. IFRS adalah standar akuntansi yang berasal dari *International Accounting Standards Board* (IASB) sebagai organisasi global yang mengatur standar akuntansi internasional. Saat ini terdapat lebih dari 150 negara di dunia telah mengadopsi dan menerapkan IFRS sebagai standar akuntansi (Wilestari & Afriani, 2019). Salah satu ciri khas dari IFRS adalah bahwa perusahaan diberikan opsi menggunakan nilai wajar untuk pengukuran aset dan kewajiban.

Nilai wajar merupakan hal yang penting sebagai unsur dalam pembuatan laporan keuangan karena dapat menggambarkan nilai pasar yang sesungguhnya terjadi (Sukendar, 2012). Berdasarkan PSAK 68 (2013), “Nilai wajar merupakan harga yang diterima saat menjual aset atau harga yang dibayar saat mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur antar pelaku pasar pada saat tanggal pengukuran”. Oleh sebab itu, keterbukaan pengungkapan nilai wajar berdampak terhadap tingkat keandalan, serta dorongan modal dari para investor (Zhang et al., 2019). Pengukuran nilai wajar di Indonesia sendiri terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 68 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2015 (PSAK68, 2013) dengan memperhatikan IFRS 13 sebagai pedoman dalam penyusunan PSAK 68. Pengungkapan nilai dan pengukuran nilai wajar secara wajib memiliki 3 input level nilai wajar yang dijelaskan

di dalam PSAK 68 (2013) untuk dapat membedakan input yang dapat diinvestigasi dan tidak dapat diinvestigasi. Input level 1 yaitu harga kuotasian yang dapat ditemukan di pasar aktif, input level 2 yaitu input selain harga kuotasian yang masih dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan input level 3 yaitu input yang tidak dapat diobservasi (PSAK 68, 2013). Dengan adanya 3 level input nilai wajar, informasi mengenai nilai wajar yang ada didalam suatu perusahaan dapat diketahui dan dipercaya kebenarannya sebagai pedoman investor dalam pembelian saham. Karena hampir di setiap perusahaan memiliki cara penilaian nilai wajar yang berbeda dan tingkat kehandalan yang berbeda.

Di negara berkembang, nilai wajar merupakan tantangan karena kondisi yang tidak mendukung. Menurut penelitian Xiao & Hu (2017) yang dilakukan kepada *Chief Financial Officer (CFO)*, auditor, dan analis keuangan ditemukan beberapa tantangan utama yaitu kesulitan dalam memperoleh informasi nilai wajar yang disebabkan karena pasar kurang berkembang dan tidak aktif untuk aset dan kewajiban tertentu. Implementasi nilai wajar di Indonesia mengalami beberapa tantangan, antara lain adalah tidak semua instrumen keuangan diperdagangkan di pasar modal ditambah tidak adanya pasar aktif baik itu aset keuangan dan non keuangan, sehingga sulit untuk menentukan nilai wajar dengan menggunakan data pasar, atau menggunakan kuotasi pasar secara langsung. Hal ini terjadi dikarenakan implementasi nilai wajar terutama level 1 berbasis harga yang tersedia di pasar aktif (Šodan, 2015). Oleh karena itu di Indonesia jarang sekali menggunakan pengukuran input nilai wajar level 1, mayoritas menggunakan input level 2 dan 3. Hal ini mengakibatkan kurangnya data pasar aktif pada perusahaan industri keuangan (Šodan, 2015). Kurangnya literasi serta rendahnya budaya investasi dimasyarakat mengakibatkan tingkat transaksi jual / beli pada pasar

modal menjadi semakin rendah, sehingga jumlah data pasar aktif yang ada menjadi terbatas (Kemu, 2016). Penggunaan input nilai wajar level 2 menjadi salah satu level pengukuran nilai wajar dengan mencari data harga aset dan liabilitas yang setipe kemudian di quote (PSAK 68, 2013). Dengan demikian input nilai wajar level 2 nilai dapat dikatakan cukup handal dan dapat dipercaya. Sementara untuk input nilai wajar level 3 tidak dapat disesuaikan dengan harga aset dan liabilitas setipe yang ada di dalam pasar aktif, sehingga pengukurannya dengan menghitung perkiraan manajer serta menggunakan informasi yang dimiliki perusahaan (PSAK 68, 2013). Tingkat subjektivitas dalam level 3 yang cukup tinggi bisa mengancam kehandalan nilai wajar. Keadaan ini memungkinkan manajer perusahaan melakukan manipulasi data harga yang ada melalui mekanisme perhitungan yang disesuaikan dengan kepentingan manajemen (Palasari, 2018).

Palasari (2018) melakukan penelitian mengenai apakah penerapan akuntansi nilai wajar berpengaruh terhadap indikasi manipulasi laporan keuangan. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa akuntansi nilai wajar level 2 dan level 3 berpengaruh positif terhadap indikasi manipulasi laporan keuangan, yang berarti semakin tinggi aset dengan nilai wajar level 2 dan level 3 maka semakin tinggi pula adanya indikasi manipulasi di dalam laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu penelitian mengenai pengukuran nilai wajar dan input yang digunakan mendapatkan banyak perhatian dari para peneliti.

Berdasarkan beberapa penelitian yang menyatakan bahwa nilai wajar level 3 memiliki lebih banyak unsur subjektifitas, maka, nilai wajar level 1 dan 2 akan lebih relevan dalam pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan, termasuk investor. Nilai wajar level 1 merupakan level yang paling dapat diandalkan sedangkan

nilai wajar level 3 merupakan level yang paling tidak dapat diandalkan, dengan level 2 sebagai level penengah (Song et al., 2010). Pernyataan tersebut dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan Zhang et al., (2019) bahwa bank dengan skor pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi dan lebih kuat tata kelola perusahaan cenderung memiliki persentase aset nilai wajar Level 3 yang lebih rendah. Selain itu, perusahaan dengan Level 3 yang lebih tinggi memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah. Selanjutnya penelitian Goh et al., (2015) menemukan bahwa relevansi nilai dari nilai wajar sangat tergantung dari level input yang digunakan. Mereka menyajikan bukti bahwa investor bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk aset nilai wajar level 1 dibandingkan dengan aset nilai wajar lainnya, yang menunjukkan bahwa input nilai wajar Level 1 lebih relevan daripada input nilai wajar level 2 dan 3. Studi tersebut memberikan bukti empiris bahwa informasi dalam hierarki input nilai wajar akan sejalan dengan tingkat relevansi nilai dari nilai wajar. Terbukti bahwa nilai wajar level 1 lebih relevan dibandingkan nilai wajar level 2 dan level 3 terkait keputusan investor (Siekkinen, 2016).

Pasar modal Indonesia masih memiliki berbagai hambatan dalam menentukan nilai wajar secara langsung melalui pasar aktif yang disebabkan karena terbatasnya produk investasi yang beredar, jumlah investor yang tidak terlalu banyak, serta sedikitnya emiten yang memiliki kinerja memadai (Muklis, 2016). Selain itu cukup banyak saham yang tidak aktif diperdagangkan (saham tidur), sehingga jumlah saham yang aktif diperdagangkan cenderung sedikit (Linawati, 2016). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia tahun 2016, terdapat paling sedikit 100 saham yang tidak aktif diperdagangkan di bursa saham Indonesia. Hambatan tersebut menyebabkan tingkat likuiditas bursa saham di Indonesia cenderung kurang likuid.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis relevansi nilai dari implementasi nilai wajar pada industri keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berfokus pada perusahaan perbankan serta industri keuangan tahun 2015-2019. Alasan peneliti menggunakan sektor tersebut sebagai sampel dikarenakan perusahaan perbankan dan industri keuangan merupakan penopang perekonomian yang memiliki hubungan dengan pemangku kepentingan dan masyarakat luas (Zhang et al., 2019). Perusahaan perbankan dan industri keuangan merupakan perusahaan yang memiliki aset serta liabilitas keuangan yang cukup substansial jika dibandingkan dengan industri lainnya, sehingga paling sering menggunakan implementasi nilai wajar. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Pascayanti et al., (2017) yang menjelaskan bahwa perusahaan perbankan dan industri keuangan memiliki transaksi yang lebih dominan sehingga industri ini memiliki pengaruh besar terhadap implementasi nilai wajar dibandingkan perusahaan sektor lainnya.

Penelitian terkait peran tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi pada penelitian ini masih terbatas dilakukan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan negara maju lainnya. Penelitian implementasi nilai wajar di Indonesia oleh Pascayanti et al., (2017) memberikan hasil bahwa pengukuran nilai buku (*book value per share*), laba (*earning per share*), nilai wajar aset keuangan dan nilai wajar aset liabilitas menurut PSAK55, (2013) relevan untuk pengambilan keputusan investor yang tercermin dalam pengaruhnya terhadap harga saham dan return saham. Oleh karena itu topik ini masih jarang ditemukan dibandingkan dengan penelitian yang ada di negara lain.

Kebaruan dalam penelitian ini ditunjukkan dengan penambahan variabel moderasi yaitu tata kelola perusahaan. Bagi setiap perusahaan, tata kelola perusahaan merupakan mekanisme utama, karena penerapan tata kelola yang baik berdampak pada aktivitas operasi perusahaan yang berjalan dengan efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan nilai dari suatu perusahaan (Siek & Dr. Werner Ria Murhadi, S.E., 2015). Variabel moderasi tata kelola perusahaan digunakan peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut dapat memperkuat hubungan antara nilai wajar dan relevansi nilai (Song et al., 2010). Indikator pengukuran variabel tata kelola perusahaan melihat dari independensi dewan komisaris, aktivitas komite audit, dan komite risiko. Indikator tersebut dipilih karena perusahaan dengan dewan dan komite yang lebih kuat diharapkan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi dalam angka akuntansi (Siekkinen, 2016). Karena tata kelola perusahaan yang lemah memungkinkan manajer melakukan tindakan oportunistik (Bowen et al., 2008).

Dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak boleh terlibat dalam pengelolaan perusahaan (Rimardhani et al., 2016). Independensi dewan komisaris merupakan kunci dalam memastikan bahwa manajer tidak melakukan perilaku oportunistik (Mwapula, 2016). Independensi dewan komisaris dapat diketahui dari proporsi dewan komisaris independen dibandingkan dengan anggota dewan komisaris perusahaan. Tugas dari dewan komisaris independen adalah melakukan pengawasan terkait kualitas informasi, kelengkapan laporan serta memberikan masukan bagi dewan direksi. Keberadaan independensi dewan komisaris dapat meningkatkan keyakinan investor terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan karena dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam tata kelola perusahaan (Gunawijaya, 2015). Dengan meningkatnya keyakinan investor, maka fungsi

independensi dewan komisaris dapat memperkuat hubungan relevansi nilai dari nilai wajar. Terkait pembahasan tersebut, maka peneliti menggunakan independensi dewan komisaris sebagai salah satu proksi untuk mengukur tata kelola perusahaan.

Aktivitas komite audit merupakan mekanisme pengawasan dan tata kelola yang efektif oleh komite audit. Aktivitas komite audit diukur melalui jumlah rapat komite audit, jumlah atau proporsi komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi, serta jumlah atau proporsi komite audit independen (Pamudji & Trihartati, 2010). Semakin tinggi frekuensi rapat yang diadakan akan meningkatkan keefektifan komite audit dalam mengawasi manajemen manajemen, agar tidak berusaha mengoptimalkan kepentingannya sendiri (Kusumaningtyas & Farida, 2015). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015, Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan (Hardanti & Nuritomo, 2017). Pertemuan rapat yang diadakan secara berkala membuat komite audit dapat bergerak lebih cepat dalam mendeteksi serta menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam perusahaan untuk mengantisipasi munculnya permasalahan yang lebih besar (Liyanto & Anam, 2019). Dengan demikian perilaku menyimpang yang ada didalam perusahaan dapat segera dihilangkan dan aktivitas komite audit dapat memperkuat relevansi nilai dari nilai wajar. Terkait pembahasan tersebut, maka peneliti menggunakan aktivitas komite audit sebagai salah satu proksi untuk mengukur tata kelola perusahaan.

Komite risiko bertujuan untuk menentukan dan mengevaluasi risiko (Subramaniam et al., 2009). Komite risiko dapat memantau dan memberi saran kepada manajemen dalam estimasi nilai wajar, sehingga berpotensi mengurangi masalah dan risiko terkait nilai wajar Level 3 (Song et al., 2010). Dalam penelitian Aebi et al., (2012) mengatakan bahwa memiliki komite risiko secara umum menunjukkan

manajemen risiko yang lebih kuat dan akibatnya tata kelola perusahaan yang lebih baik. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa komite risiko mengarah pada tata kelola perusahaan yang lebih baik, yang mengurangi kemungkinan perilaku oportunistik di antara manajer (Bowen et al., 2008). Terkait pembahasan tersebut, maka peneliti menggunakan komite risiko sebagai salah satu proksi untuk mengukur tata kelola perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jimi Siekkinen. Penelitian tersebut sebelumnya dilakukan di negara Uni Eropa dengan hasil yang menunjukkan bahwa semua nilai wajar dalam hierarki nilai wajar adalah nilai yang relevan, terlepas dari levelnya. Dengan mempertimbangkan bahwa penelitian dengan variabel ini masih jarang dilakukan di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “MODERASI DARI TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP RELEVANSI NILAI DARI NILAI WAJAR”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah nilai wajar memiliki relevansi nilai?
2. Apakah nilai wajar level 1 memiliki relevansi nilai lebih besar jika dibandingkan dengan level 2 dan 3?
3. Apakah independensi dewan komisaris memperkuat hubungan antara nilai wajar dengan relevansi nilai?
4. Apakah aktivitas komite audit memperkuat hubungan antara nilai wajar dengan relevansi nilai?

5. Apakah komite risiko memperkuat hubungan antara nilai wajar dengan relevansi nilai?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

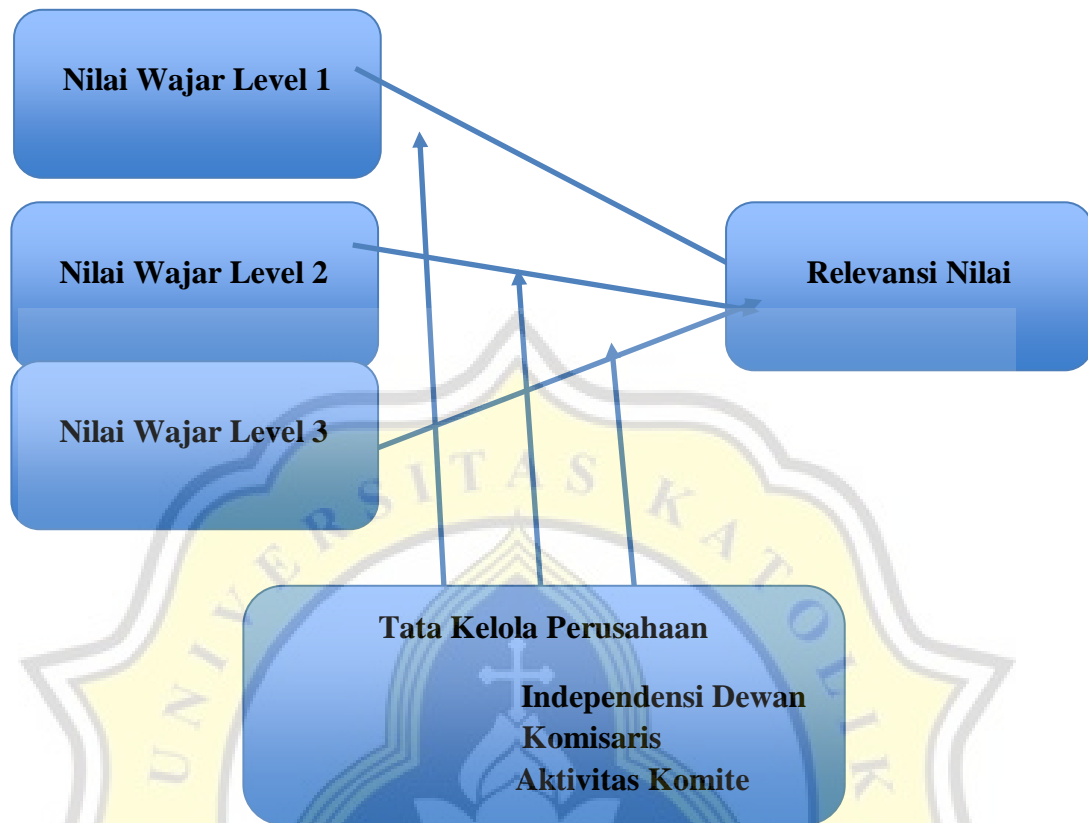
1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah nilai wajar memiliki relevansi nilai.
2. Untuk mengetahui apakah nilai wajar level 1 memiliki relevansi nilai lebih besar jika dibandingkan dengan level 2 dan 3
3. Untuk mengetahui apakah independensi dewan komisaris dapat memperkuat hubungan antara nilai wajar dengan relevansi nilai.
4. Untuk mengetahui apakah aktivitas komite audit dapat memperkuat hubungan antara nilai wajar dengan relevansi nilai.
5. Untuk mengetahui apakah komite risiko dapat memperkuat hubungan antara nilai wajar dengan relevansi nilai.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi bagi pemangku kepentingan terkait relevansi nilai dari nilai wajar dalam perusahaan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

1.4 Kerangka Pikir



Penelitian ini menguji bagaimana peran tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi terhadap relevansi nilai dari nilai wajar level 1, level 2, dan level 3. Dimana tata kelola perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara nilai wajar level 1, level 2, dan level 3 terhadap relevansi nilai. Pada umumnya variabel moderasi ini meningkatkan relevansi nilai ketika tata kelola perusahaan menjalankan fungsinya dengan baik dan membuat hubungan relevansi nilai dan nilai wajar meningkat kuat. Hal ini dapat menjadi faktor pendukung bagi para investor dalam mengambil keputusan berdasarkan keandalan nilai wajar dalam suatu perusahaan dimana informasi kepada investor dan peran tata kelola perusahaan dapat mengurangi masalah asimetri yang timbul dari input nilai wajar yang relatif kurang dapat diandalkan (Song et al., 2010).